

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah telah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dalam menetapkan dan merencanakan kebijakan dan program kegiatan pada masing-masing daerah. Dengan mulai berlakunya otonomi daerah, pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah menjadi lebih mandiri, sehingga kesuksesan pembangunan daerah menjadi agenda penting yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Perlu dilakukannya perencanaan untuk tercapainya tujuan dan kesuksesan daerah .

Mekanisme perencanaan pembangunan sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa, dalam rangka menyusun RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Sedangkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional, maka pemerintah perlu menyelenggarakan musrembang provinsi dan musrembang nasional. Semua masukan yang diperoleh dari Musrembang secara berjenjang ini diperlukan karena

akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) pada tahun 2016 di Kota Bukittinggi menjadi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) adalah lembaga yang tugas dan fungsinya diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tugasnya bertanggung jawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada tingkat daerah. BAPELITBANG Kota Bukittinggi sebagai lembaga bertugas melaksanakan perencanaan pada pembangunan daerah serta membantu Walikota Bukittinggi dalam merumuskan kebijakan.

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 lampiran 3. Pada Permendagri tersebut terdapat beberapa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu persiapan penyusunan RPJMD , penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD , pelaksanaan musrembang RPJMD , penyusunan rancangan akhir RPJMD dan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya perpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD dan memperhatikan RPJM nasional . RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum , program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana-

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat induktif. Penjabaran RPJMD dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD kota Bukittinggi merupakan sub bagian dari sistem RPJM Nasional yang memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini RPJMD Provinsi Sumatra Barat telah mengacu kepada RPJM Nasional, sehingga kaitan yang lebih spesifik antara RPJMD kota Bukittinggi terhadap RPJMD Provinsi Sumatra Barat terdapat sinergi dalam pencapaian tujuan nasional. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 -2021 adalah rencana lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. RPJMD ini akan menjadi arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Beraskan landasan di atas penulis ingin membahas masalah perencanaan pembangunan, terutama perencanaan pembangunan jangka menengah pada BAPELITBANG Kota Bukittinggi dengan judul **“Mekanisme Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kota Bukittinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut , maka rumusan masalah untuk judul di atas adalah :

1. Bagaimana mekanisme Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah pada BAPELITBANG Kota Bukittinggi.
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah pada BAPELITBANG Kota Bukittinggi.

1.3 Tujuan Pengamatan

1. Untuk mengetahui mekanisme Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah pada BAPELITBANG Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam penyusunan RPJM pada BAPELITBANG Kota Bukittinggi

1.4 Metode Pengamatan

Pengamatan ini dilaksanakan selama 40 hari kerja yang berlokasi pada Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian BAPELITBANG yang berlokasi Jln. Sudirman No.27-29 Bukittinggi Sumatra Barat

1.4.1 Desain Pengamatan

Dalam tugas akhir ini menggunakan desain pengamatan berupa observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati mekanisme penyusunan RPJM .

1.4.2 Jenis dan Sumber Daya

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan data yang di dapat dari hasil pengamatan langsung dari obyek yang diamati tanpa melalui perantara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh melalui perantara. Mempunyai bukti berupa catatan atau laporan yang disusun ke dalam tangkuman dokumen yang bisa dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data ini berupa sejarah berdirinya BAPELITBANG, struktur Organisasi serta data di dapat dari petugas bagian perencanaan.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi menurut Arikunto (2006:124) , observasi adalah pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Penulis melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki penulis melakukan pengamatan mengenai mekanisme perencanaan pembangunan jangka menengah pada BAPELITBANG Kota Bukittinggi pada 1 Junu 2017- 28 Juli 2017 . Pengamatan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan jangka menengah pada BAPELITBANG Kota Bukittinggi untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud untuk meminta keterangan kepada orang yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara mengenai mekanisme perencanaan pembangunan jangka menengah pada BAPELITBANG Kota Bukittinggi dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan petugas BAPELITBANG pengamatan ini dimulai tanggal 1 Juni 2017 – 28 Juli 2018 dengan tujuan mengetahui mekanisme perencanaan pembangunan jangka menengah pada BAPELITBANG Kota Bukittinggi.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, lokasi dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembangunan daerah, serta landasan hukum tentang perencanaan pembangunan

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) kota Bukittinggi yang meliputi sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi pembahasan tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) kota Bukittinggi

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang dilakukan penulis dan saran.

